

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Feminisme merupakan gerakan sosial dan intelektual yang telah mengalami evolusi panjang dalam sejarah dunia. Dalam ketentuan kebahasaan berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* menyebutkan Feminisme sebagai gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak secara sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki. Secara etimologi, menurut Lisa Tuttle (1986) dalam *Buku Feminisme* (2024) menuturkan bahwa kata 'Feminisme' berasal dari bahasa Inggris (*feminism*) yang merupakan serapan dari bahasa Latin *Femina* (Perempuan). Sementara berdasarkan terminologinya, feminisme memiliki ungkapan sebagai *having the qualities of females* (memiliki sifat seperti perempuan) (Aizid, 2024).

Istilah feminisme muncul pada abad ke 18 yang dicetuskan oleh seorang filsuf yang beraliran sosialis berkebangsaan Prancis yaitu Charles Fourier. Pada tahun 1837, ia mengkritisi dan menolak penindasan terhadap perempuan dan menuntut kebebasan dan keadilan yang sama dalam sektor pendidikan, sosial, politik terutama dalam hal memperoleh jenjang karir yang baik seperti laki-laki (Taufik, 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa gerakan, sikap, sifat dan pemikiran Feminisme tidak dibatasi oleh peran perempuan saja, namun laki-laki juga bisa menjadi salah satu bagian dari yang menyuarakan keadilan bagi perempuan.

Gerakan feminisme tidak hanya berfokus pada emansipasi wanita, tetapi pada dasarnya bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan secara adil tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban dari keduanya. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan sistemik yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat (dinomorduakan)

dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hukum, pendidikan, hingga pekerjaan (Hidayati, 2018).

Perkembangan feminisme di dunia, ditandai dengan adanya gelombang pertama feminisme pada abad ke-19 sampai awal abad ke-20, yang berfokus pada hak-hak hukum, terutama hak suara bagi Perempuan. Tercetusnya gelombang ini diinspirasi dari peristiwa revolusi Amerika (1775-1783) dan revolusi Prancis (1789-1799). Pelopor yang mendasari adanya gerakan feminisme pertama kali di Eropa adalah Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet kemudian dilengkapi oleh hadirnya peran dari Mary Wollstonecraft, dimana melalui tulisannya ia berhasil menginspirasi para feminis hingga Amerika. Hingga perjuangannya dilanjutkan oleh Harriet dan John Stuart Mill (Aizid, 2024).

Dasar pemikiran feminisme Mary Wollstonecraft itu pada intinya menuntut hak pendidikan dan kesetaraan bagi perempuan, yang pada saat itu ruang gerak untuk berekspresinya dibatasi hanya pada hal domestik di dalam rumah saja (Hidayati, 2018). Walaupun pada pergerakannya Mary tidak menggunakan diksi *Feminisme* melainkan *Womanisme*, hingga titik puncak perjuangannya mengantarkan para perempuan memperoleh hak pilih pada abad ke-20.

Setelah itu, gelombang kedua muncul pada pertengahan abad ke-20 (1960-an sampai 1980-an) yang lahir dari respon pasca perang Dunia ke-2 yang ditandai dengan hadirnya sosok Betty Friedan melalui tulisannya yang berjudul *The Feminine Mystique* yang menentang visualisasi oleh media terhadap perempuan. Pada gelombang ketiga muncul pada akhir 1980-an (Post-Feminisme) hingga banyak pro-kontra pada fase ini, karena menekankan pentingnya keberagaman identitas terutama pada perempuan itu sendiri yang berasal dari ras kulit hitam, kaum pekerja dan lesbian, interseksionalitas, serta kritik terhadap norma-norma patriarkal dalam budaya populer dan media (Aizid, 2024).

Selain itu terdapat pula pelopor feminisme beraliran Islam yaitu Qasim Amin, Amina Wadud Muhsin, dan Fatimah Mernissi. Qasim Amin

berasal dari Mesir, dikenal sebagai salah satu tokoh awal yang menyerukan pembebasan perempuan Muslim dan pentingnya pendidikan dan hak-hak sipil perempuan dalam kerangka nilai-nilai Islam melalui karya-karyanya seperti *Tahrir al-Mar'ah* (Pembebasan Perempuan). Amina Wadud Muhsin, seorang cendekiawati asal Amerika Serikat, memberikan kontribusi besar melalui penafsiran ulang terhadap Al-Qur'an dari perspektif perempuan, khususnya dalam bukunya *Qur'an and Woman*, yang menegaskan bahwa teks suci tidak bersifat patriarkal, tetapi telah di salah pahami oleh tafsir-tafsir yang bias gender. Sementara itu Fatimah Mernissi, seorang sosiolog dan penulis asal Maroko, mengkritisi hadis-hadis yang digunakan untuk menjustifikasi ketimpangan gender melalui karya-karyanya seperti *The Veil and the Male Elite*, ia membongkar konstruksi sosial yang menindas perempuan dalam masyarakat Islam (Aizid, 2024).

Sementara itu, perkembangan feminisme di Indonesia memiliki akar yang kuat dan khas, yang tumbuh dari konteks sosial, budaya, dan politik bangsa sendiri. Meskipun tidak selalu disebut dengan istilah "feminisme" secara eksplisit, perjuangan perempuan Indonesia untuk keadilan dan kesetaraan telah berlangsung sejak masa kolonial. Adapun yang menjadi pelopor gerakan feminisme di Indonesia adalah L.A. Lasminingrat, Raden Dewi Sartika, Raden Siti Jenab, Emma Poeradiredja, dan Raden Ajeng Kartini. Kelima tokoh ini memberikan kontribusi besar dalam bidang pendidikan perempuan.

L.A. Lasminingrat mendirikan sekolah untuk anak perempuan di Garut dan menerjemahkan buku-buku berbahasa Belanda ke dalam bahasa Sunda. Raden Dewi Sartika membuka sekolah khusus perempuan di Bandung pada 1904, yang menjadi model pendidikan perempuan di Hindia Belanda. Raden Siti Jenab dikenal sebagai guru perempuan pertama di Jawa Barat yang aktif mendorong partisipasi perempuan dalam pendidikan. Emma Poeradiredja mendirikan organisasi dan sekolah perempuan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan kaum wanita. Raden Ajeng Kartini, melalui surat-suratnya menyuarakan

pentingnya pendidikan sebagai jalan pembebasan perempuan dari belenggu tradisi. Upaya mereka menjadi pijakan awal perjuangan perempuan Indonesia menuju kesetaraan melalui jalur pendidikan.

Pada perkembangannya, perhatian khusus terhadap masa depan Perempuan telah diberikan kesempatan pada masa Orde Lama, dimana Soekarno pada masa itu memperbolehkan berdirinya organisasi yang memperjuangkan hak Perempuan seperti Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) pada 1965. Namun, gerakan ini diredupkan pada era Orde Baru dengan memberikan pencitraan yang buruk yang berkaitan dengan G30SPKI terhadap Gerwani, dan Perempuan pada saat itu dikembalikan pada posisi kodratnya sebagai ibu dan istri. Memasuki era Reformasi, feminisme Indonesia kembali bangkit dan berkembang secara lebih terbuka. Isu-isu seperti kekerasan terhadap perempuan, perdagangan manusia, diskriminasi hukum, serta hak-hak reproduksi menjadi fokus utama berbagai organisasi seperti KOMNAS Perempuan, LBH APIK, dan Yayasan Jurnal Perempuan (Aizid, 2024).

Perjalanan panjang gerakan feminisme di Indonesia mencerminkan dinamika relasi kuasa dalam merumuskan peran dan posisi perempuan di ruang publik. Sejarah ini menjadi fondasi penting dalam memahami bagaimana isu-isu perempuan mulai kembali mendapat perhatian dalam diskursus politik, termasuk dalam forum-formal politik seperti debat calon kepala daerah. Perspektif feminisme menjadi alat analisis yang relevan untuk mengkritisi dan mengkaji pesan-pesan politik yang disampaikan oleh para calon gubernur tidak hanya dalam merepresentasikan aspirasi masyarakat secara umum, tetapi juga dalam menilai sejauh mana mereka merespons persoalan dan kepentingan perempuan secara substantif.

Kehadiran perempuan dalam jabatan politik memiliki urgensi yang tak dapat diabaikan, terutama dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Perempuan membawa perspektif yang unik, yang sering kali merefleksikan pengalaman hidup dan kebutuhan kelompok yang selama ini kurang terwakili dalam pengambilan

keputusan. Keterlibatan perempuan di posisi strategis mampu mengubah pola pikir masyarakat tentang peran gender, sekaligus mendorong terciptanya ruang publik yang lebih egaliter.

Perkembangan peran perempuan dalam kancah politik di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan, terutama dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Salah satu fenomena yang menarik perhatian adalah situasi di Provinsi Jawa Timur, yang menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia dengan dominasi kandidat gubernur perempuan. Dari total 38 provinsi yang mengikuti Pilkada serentak, hanya Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak menggelar pemilihan gubernur karena menganut sistem monarki konstitusional, sementara 36 provinsi lainnya mayoritas diisi oleh kandidat laki-laki. Fenomena di Jawa Timur ini mencerminkan dinamika baru dalam politik lokal, khususnya terkait dengan partisipasi dan representasi perempuan dalam kepemimpinan daerah.

Kondisi ini menjadi penting karena dalam sejarah penyelenggaraan Pilgub Jawa Timur sejak 2008 hingga 2018, belum pernah terjadi seluruh kandidat gubernur berasal dari kalangan perempuan. Pada masa-masa sebelumnya, kandidat perempuan hanya tampil berpasangan dengan laki-laki atau menjadi salah satu dari beberapa pasangan calon yang mayoritas didominasi laki-laki. Berdasarkan data dari *Kompas.id*, Pilgub Jawa Timur tahun 2008 diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono, Sutjipto-Ridwan Hisjam, dan Soenarjo-Ali Maschan Moesa. Kemudian pada tahun 2013, muncul pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf, Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja, dan Bambang Dwi Hartono-Said Abdullah. Selanjutnya, pada tahun 2018, Khofifah Indar Parawansa berpasangan dengan Emil Elestianto Dardak melawan Saifullah Yusuf yang berpasangan dengan Puti Guntur Soekarno (Krisdamarjati, 2024).

Perubahan paling mencolok terjadi pada Pilkada 2024, di mana untuk pertama kalinya, seluruh figur yang disebut sebagai kandidat kuat

gubernur Jawa Timur adalah perempuan, yakni Khofifah Indar Parawansa, Tri Rismaharini, dan Luluk Nur Hamidah. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam penerimaan publik terhadap kepemimpinan perempuan serta keberhasilan politik perempuan dalam membangun rekam jejak politik yang kompetitif. Fenomena ini juga menandai transformasi sosial-politik yang semakin membuka ruang bagi perempuan untuk tampil sebagai aktor utama dalam kontestasi politik di tingkat daerah, khususnya di provinsi dengan jumlah pemilih terbesar kedua di Indonesia ini.

Tiga perempuan tersebut adalah pasangan calon nomor urut 1 yaitu Luluk Nur Hamidah anggota DPR RI dari PKB, maju bersama Lukmanul Hakim. Pasangan nomor urut 2 diisi oleh petahana Khofifah Indar Parawansa yang kembali mencalonkan diri bersama Emil Dardak, diusung Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari 15 partai, termasuk PKS dan partai pemerintah. Sementara itu, Tri Rismaharini sebagai mantan Menteri Sosial RI dan Wali Kota Surabaya dua periode, mencalonkan diri sebagai pasangan nomor urut 3 bersama Gus Hans, didukung PDI Perjuangan.

Ketiganya memiliki visi dan misi yang mencerminkan perhatian terhadap isu inklusivitas dan keadilan sosial, meskipun tingkat keterkaitannya dengan perspektif feminisme berbeda-beda. Paslon nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah - Lukmanul Khakim mengusung visi yang holistik dan berwawasan lingkungan, serta misi yang menekankan pembangunan manusia dan pemerataan infrastruktur. Meski inklusivitas ditegaskan, strategi konkret untuk pemberdayaan perempuan belum terlihat jelas. Sementara paslon nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa - Emil Dardak lebih eksplisit dalam memasukkan pendekatan feminis, seperti pengentasan kemiskinan untuk kelompok rentan termasuk perempuan, serta pengarusutamaan gender dalam misinya, yang menunjukkan kesadaran atas ketimpangan struktural. Adapun paslon nomor urut 3, Tri Rismaharini - Gus Hans menekankan pada nilai moral dan pemerintahan bersih melalui visi “Jawa Timur Resik,” serta misi

yang mendukung akses pendidikan dan kesehatan yang merata. Walau tidak secara eksplisit menyebut isu gender, komitmen mereka terhadap hak kelompok rentan dan keadilan sosial mengindikasikan pendekatan feminisme yang lebih implisit.

Fenomena ini mencerminkan adanya perubahan pola pikir serta dinamika sosial-politik yang mendorong perempuan untuk tampil lebih aktif di ruang publik. Selain itu, keberadaan tiga perempuan unggul sebagai calon gubernur ini turut menjadi cerminan bahwa perjuangan untuk kesetaraan gender di Jawa Timur memiliki daya ukur potensi yang kuat, sekaligus memberikan pesan kepada provinsi lain untuk mulai mengikis hambatan struktural yang selama ini membatasi peran perempuan dalam politik.

Menurut Anne Phillips, sebagaimana dikutip dalam *Teori-Teori Politik* karya Muslim Mufti (2012), keterwakilan perempuan dalam politik sangat penting agar kepentingan dan kebutuhan perempuan dapat tersampaikan secara adil. Ia menegaskan bahwa kesetaraan perempuan harus hadir dalam empat aspek utama yaitu sebagai model peran yang memotivasi perempuan lain untuk terlibat, sebagai bentuk keadilan dalam partisipasi pengambilan keputusan, sebagai pengawal kepentingan perempuan agar tidak termarginalkan, dan sebagai elemen revitalisasi demokrasi dengan sudut pandang yang berbeda dari laki-laki. Kehadiran perempuan dalam posisi strategis bukan hanya soal jumlah, melainkan untuk menjamin kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu seperti kesehatan reproduksi, perlindungan pekerja perempuan, dan kekerasan berbasis gender. Tanpa keterlibatan mereka, kebijakan-kebijakan tersebut berisiko diabaikan dalam proses legislasi (Mufti, 2012).

Kehadiran perempuan dalam ruang politik elektoral, perlu dianalisis melalui struktur dan isi wacana yang mereka bangun, khususnya terkait isu-isu perempuan. Apakah narasi mereka mampu mengartikulasikan posisi politik yang berpihak pada pengalaman dan persoalan struktural yang dihadapi perempuan Jawa Timur seperti

kekerasan berbasis gender, beban ganda domestik, dan marjinalisasi dalam sektor ekonomi dan politik menjadi pertanyaan kritis yang harus diajukan, narasi ini dapat dianalisis melalui debat Pilkada yang diselenggarakan oleh KPU Jawa Timur.

Debat bukan sekadar ajang saling menyanggah pendapat, melainkan merupakan mekanisme penting dalam tradisi demokrasi yang memungkinkan munculnya gagasan-gagasan kritis dan solusi terhadap persoalan publik. Sejak pertengahan abad ke-18 di London, debat telah menjadi bagian dari budaya politik masyarakat dalam merumuskan kebijakan secara kolektif. Praktik ini kemudian berkembang menjadi metode yang lazim digunakan di lembaga-lembaga tinggi negara untuk membahas isu-isu penting dan mengambil keputusan yang mewakili kepentingan publik.

Dalam konteks modern, debat formal antara kandidat kepala daerah atau presiden menjadi instrumen strategis dalam proses pemilihan umum. Melalui debat, masyarakat tidak hanya dapat menilai kemampuan para kandidat dalam mengartikulasikan gagasan dan solusi, tetapi juga menguji sejauh mana mereka mampu berpikir kritis, merespons isu nyata, dan menawarkan langkah konkret. Oleh karena itu, debat politik memiliki peran signifikan sebagai ruang pembuktian kapasitas kepemimpinan dalam menghadapi tantangan masyarakat secara teoritis maupun praktis (Pratama, H., et., al., 2018).

Berdasarkan perspektif analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Norman Fairclough, penting untuk tidak hanya memahami kehadiran ini sebagai representasi simbolik, tetapi juga sebagai praktik diskursif yang menyatu dengan relasi kuasa. Fairclough (1995) menekankan bahwa wacana tidak hanya merefleksikan realitas sosial, tetapi juga membentuk dan mengonstruksi struktur sosial tersebut. Dalam kerangka analisis wacana kritis, penting bagi penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam narasi dan struktur bahasa yang digunakan oleh para kandidat perempuan dalam debat politik, sebab di sanalah ideologi, identitas, dan kepentingan politik diartikulasikan. Analisis ini

tidak hanya membaca teks, tetapi juga menelusuri relasi kuasa yang tersembunyi di balik wacana politik yang tampak netral.

Hadirnya ketiga kandidat calon gubernur perempuan tersebut menjadi perhatian bagi peneliti, apakah isu terhadap perempuan akan menjadi fokus utama ketiga kandidat tersebut dalam memperjuangkan hak-hak Perempuan yang banyak termaginalkan. Seperti yang diungkapkan oleh Wawan Sobari (2024) yang merupakan pengamat politik dari Universitas Brawijaya dalam pernyataan yang dimuat dalam laman media *Pilkada Detik Jatim* (2024) bahwa kepentingan Perempuan dan anak tidak bisa terlepas, sehingga seharusnya kepentingan ini dapat terwakilkan oleh para kandidat. Beliau menilai ketewakilan Perempuan dan anak tidak di hegemoni dalam satu rangkulan penuh dan menyeluruh dalam visi misi ketiga kandidat gubernur Jawa Timur tersebut (Rahma, 2024).

Oleh karena itu, untuk menganalisis paradigma feminisme yang dimiliki oleh ketiga kandidat calon Gubernur Jawa Timur 2024 dalam merumuskan kebijakan ke depan, penelitian ini akan mendalami perspektif mereka melalui debat terbuka yang diselenggarakan oleh KPU Jawa Timur. Debat ini, yang direncanakan berlangsung dalam tiga tahapan yang menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi sejauh mana setiap kandidat memprioritaskan isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam agenda politik mereka.

KPU Jawa Timur melibatkan para panelis dari kalangan akademika beberapa universitas di Jawa Timur untuk menyusun topik diskusi pada debat publik untuk menguji kompetensi dari para kandidat Pilgub Jatim 2024. Dimana debat tersebut meliputi 3 tema besar yaitu;

1. Transformasi Sosial dan Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Lokal Untuk Kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur.
2. Tata Kelola Pemerintah yang Efektik dan Inovatif serta Pelayanan Publik yang Inklusif untuk Keadilan Masyarakat Jawa Timur.
3. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur, Interkoneksi, Kewilayahan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk

Mewujudkan Jawa Timur yang Episentrum Ekonomi Kawasan Timur Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap apakah ketiga kandidat memiliki komitmen substantif feminisme terhadap visi misi yang disampaikan dalam debat, atau jika perspektif tersebut hanya hadir secara dangkal untuk memenuhi tuntutan elektoral. Tema-tema besar tersebut akan di klasifikasikan kembali dalam bahasan sub tema turunan. Melalui format debat pada penelitian kali ini, publik dapat mengamati bagaimana para kandidat merespon pertanyaan yang telah dibuat oleh KPU Jawa Timur bersama para akademisi dari berbagai universitas di Jawa Timur.

Debat terbuka ini tidak hanya menjadi ajang klarifikasi visi-misi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengukur kepekaan gender dan keberanian politik kandidat dalam menghadapi persoalan struktural yang dihadapi perempuan di Jawa Timur. Analisis ini juga akan mencakup evaluasi terhadap retorika yang digunakan apakah sekadar bersifat simbolis atau didukung oleh rencana konkret yang dapat diukur.

B. Perumusan Masalah

- A. Bagaimana komitmen pasangan calon dalam merepresentasikan perspektif feminisme melalui visi misi saat debat?
- B. Bagaimana pesan-pesan politik dalam debat Calon Gubernur Jawa Timur tahun 2024 mencerminkan ideologi feminisme melalui nilai-nilai kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan keadilan sosial, baik secara eksplisit maupun implisit?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan mengkaji sejauh mana pasangan calon merepresentasikan nilai-nilai feminisme dalam pernyataan visi dan misi selama debat Pilgub Jawa Timur 2024, serta menilai apakah hal tersebut mencerminkan strategi politik atau komitmen nyata terhadap kesetaraan gender berdasarkan konsistensi isu gender yang diangkat.
2. Menganalisis bagaimana pesan politik dalam debat yang memuat nilai kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan keadilan

sosial mencerminkan ideologi feminisme para calon gubernur, baik secara eksplisit maupun implisit, guna memahami tingkat keberpihakan mereka terhadap isu-isu feminisme.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu komunikasi politik dengan memperluas pemahaman tentang konstruksi pesan politik yang dilakukan oleh perempuan dalam kontestasi politik. Perspektif feminisme yang diintegrasikan dalam penelitian ini memberikan dimensi baru dalam studi komunikasi, khususnya dalam mengidentifikasi bias gender dan representasi perempuan dalam politik.

Selain itu, penelitian ini memperkaya aplikasi analisis wacana kritis, terutama dalam konteks debat calon gubernur, yang memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana pesan politik mencerminkan relasi kuasa dan nilai-nilai sosial. Penelitian ini tidak hanya melengkapi literatur yang ada, tetapi juga membuka ruang untuk studi lanjutan di bidang komunikasi politik dan gender.

2. Kegunaan Praktis

Bagi aktor politik, khususnya politisi perempuan, temuan penelitian ini dapat menjadi panduan strategis dalam menyampaikan pesan politik yang relevan dan efektif, sehingga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah atau organisasi terkait untuk memperkuat keterwakilan perempuan di ranah politik melalui kebijakan afirmasi.

Di sisi lain, penelitian ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya representasi perempuan dalam politik, sekaligus mengurangi stereotip gender yang menghambat partisipasi perempuan. Bagi partai politik dan tim sukses, penelitian ini menawarkan evaluasi strategi komunikasi politik mereka, sehingga dapat meningkatkan

efektivitas kampanye dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kebutuhan publik.

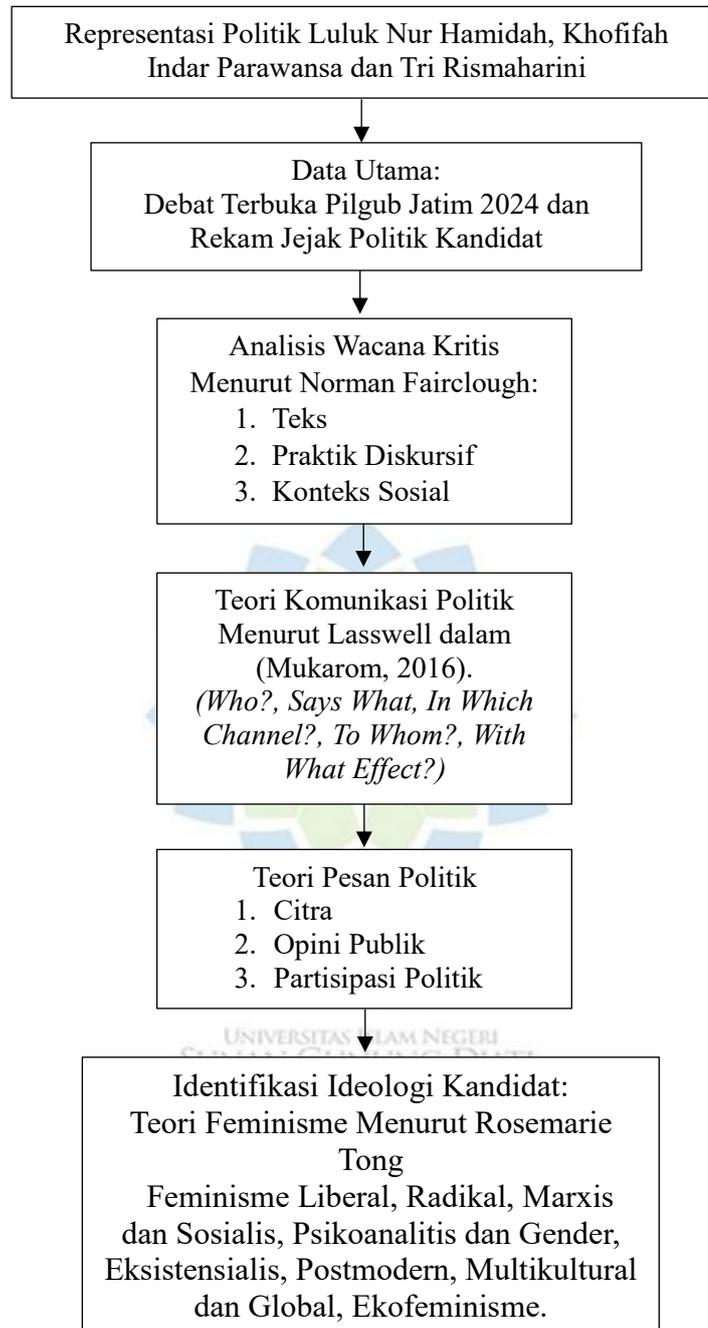
E. Kerangka Berpikir

Menurut Hasan (2002) dalam *Buku Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* Karya Dr. Annita Sari, S.Pi., M.Si., dkk (2023) menuturkan, bahwa Kerangka berpikir merupakan bagian penting dalam penelitian, karena menggambarkan alur pemikiran peneliti dalam menjelaskan alasan di balik pandangan atau asumsi yang diutarakan. Sebagai model konseptual, kerangka berpikir menunjukkan bagaimana teori-teori yang relevan saling berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting (Sari, A., et., al, 2023).

Fungsi utamanya adalah memberikan penjelasan yang sistematis, terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan dalam penelitian. Hal ini menjadikan kerangka berpikir dapat memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca tentang arah dan fokus penelitian (Sari, A., et., al., 2023). Adapun kerangka berpikir penelitian ini ditunjukkan oleh model bagan berikut:



Bagan 1. Model Kerangka Berpikir



Berdasarkan Bagan 1, model kerangka berpikir dalam penelitian ini menunjukkan bahwa fokus utama terletak pada representasi paradigma politik dari tiga tokoh perempuan Indonesia, yaitu Luluk Nur Hamidah, Khofifah Indar Parawansa, dan Tri Rismaharini. Representasi paradigma politik yang ditampilkan oleh ketiga tokoh tersebut menjadi penting untuk ditelaah karena mencerminkan nilai-nilai, strategi komunikasi, serta visi

politik yang mereka usung dalam menghadapi kontestasi politik yang masih didominasi oleh struktur patriarkal. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana ketiga tokoh perempuan tersebut memaknai, membingkai, dan menyuarakan kepentingan politiknya dalam ruang publik, serta bagaimana mereka menavigasi tantangan yang muncul dalam struktur kekuasaan yang cenderung maskulin.

Objek kajian penelitian difokuskan pada forum debat terbuka dalam rangka Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2024, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak tiga kali, yakni pada tanggal 18 Oktober 2024 (Debat Pertama), 3 November 2024 (Debat Kedua), dan 18 November 2024 (Debat Ketiga). Forum debat ini dipilih karena merupakan ruang diskursif yang terbuka, formal, dan strategis, di mana para kandidat dapat menampilkan gagasan, kebijakan, serta strategi politik yang mereka tawarkan kepada publik. Melalui forum ini, tokoh-tokoh perempuan memiliki kesempatan untuk memperlihatkan kapabilitas politik mereka, membangun narasi yang kuat, merespons isu-isu strategis, serta menarik simpati dan dukungan dari masyarakat. Debat ini sekaligus menjadi ajang untuk melihat secara langsung bagaimana para kandidat perempuan membangun otoritas, menghadapi tekanan, dan menegosiasikan identitas politiknya dalam kompetisi elektoral.

Untuk menganalisis dinamika tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Pendekatan ini menekankan pada tiga dimensi utama, yakni: (1) Analisis teks, yang berfokus pada struktur linguistik dan pilihan bahasa yang digunakan dalam debat; (2) Praktik diskursif, yang mengkaji bagaimana teks diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi; serta (3) Konteks sosial, yang menelusuri bagaimana wacana tersebut berkaitan dengan struktur sosial, kekuasaan, dan ideologi. Melalui pendekatan ini, penelitian mampu membedah bagaimana konstruksi makna politik dibangun dan bagaimana relasi kuasa serta norma-norma gender bekerja dalam proses komunikasi politik.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori komunikasi politik yang dikemukakan oleh Harold Lasswell dalam Mukarom (2016), yang dirumuskan melalui lima pertanyaan kunci: (1) *Who?*, (2) *Says What?*, (3) *In Which Channel?*, (4) *To Whom?*, dan (5) *With What Effect?*. Teori ini digunakan untuk menganalisis proses komunikasi politik secara menyeluruh, mulai dari aktor penyampai pesan, isi pesan, media atau saluran yang digunakan, audiens sasaran, hingga efek atau dampak dari komunikasi tersebut. Dalam konteks debat Pilgub Jatim, teori ini menjadi alat analisis yang relevan untuk menguraikan strategi komunikasi politik yang digunakan oleh tokoh perempuan dalam membangun pengaruh dan legitimasinya di hadapan publik.

Teori pesan politik juga menjadi pijakan penting dalam penelitian ini. Teori ini digunakan untuk melihat bagaimana pesan yang kandidat sampaikan dalam debat membentuk citra politik mereka sehingga dapat mempengaruhi opini publik dan partisipasi publik. Dengan menggunakan teori pesan politik ini, penelitian diharapkan dapat menjelaskan secara lebih mendalam bagaimana konstruksi citra, pembentukan opini, dan stimulasi partisipasi politik masyarakat yang dijalankan melalui komunikasi politik dalam forum debat.

Sebagai pelengkap analisis, penelitian ini juga mengacu pada teori feminisme yang dikembangkan oleh Rosemarie Tong. Teori ini digunakan untuk mengkaji bagaimana isu-isu feminisme muncul dalam narasi politik ketiga kandidat perempuan serta bagaimana mereka membingkai perjuangan gender dalam konteks kontestasi kekuasaan. Dengan kombinasi pendekatan dan teori tersebut, penelitian ini bertujuan mengungkap wacana dan ideologi yang membentuk citra politik perempuan dalam kontestasi Pilgub Jatim 2024.